

**PUBLIKASI ILMIAH**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSULTAN DALAM KONTRAK  
KERJA DENGAN PEMERINTAH STUDI PADA PT. MEGA SURYA  
KONSULTAN DI PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH**

**OLEH :**

**DENNY PURNAMA, ST  
NIM. A212141094**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the legal protection of the employment contract with the consultant in a government study on PT. mega solar consultant in Central Kalimantan bun base. of the results of this thesis can be concluded that the patterns that occur within the legal relationship between the employment contract consultant pt. mega solar consultant with the local government of West Kotawaringin the department of agriculture and animal husbandry with the agreement of infrastructure provision of appropriate agricultural technology plantation technical planning work the farm road to the agreement or contract to carry out construction work packages. Obstacles faced to give legal protection to consultants in the employment agreement with the government of West Kotawaringin namely the absence of legal protection against the consultants in carrying out consultancy in order to provide legal certainty to the consultants who are working, there are some clauses that incriminating consultants in carrying out the consultation include: termination contracts and termination of contracts, fines and restitution, as well as force majeure, contract work should be done so as to bring justice to each of the parties in a balanced way, including the existence of legislation specifically governing consulting services, thus providing legal certainty in doing employment and protection of consulting services. Contract clauses which provide benefits to the consultant in the implementation and completion of the employment contract, including the extended time of work, cooperation between providers with sub providers, the clause of the contract price, the peace clause in the employment contract, and the peace clause in the employment contract. Recommendations to shift the pattern of legal relations governed by the contract between the parties with the other parties to the agreements made in order to warrant the presence of an engagement on both sides. For the creation of legislation that specifically regulates the Consulting Services performed by the Consultant in order to provide legal certainty and legal protection in their work. In order for the inclusion of a clause in the contract between the Regional Government Kotawaringin by the Company that provides Consulting Services conducted in a

fair and balanced so as to produce an employment contract in accordance with the expectations of both parties.

**Keywords: Legal Protection, Against, Consultant, In, Work Contract.**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap konsultan dalam kontrak kerja dengan pemerintah studi pada PT. mega surya konsultan di pangkalan bun kalimantan tengah. dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa pola-pola hubungan hukum yang terjadi didalam kontrak kerja antara konsultan pt. mega surya konsultan dengan pemerintah daerah kabupaten kotawaringin barat dinas pertanian dan peternakan yakni dengan surat perjanjian pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian perkebunan tepat guna pekerjaan perencanaan teknis jalan usaha tani yakni dengan surat perjanjian atau kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi. Kendala yang dihadapi untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsultan dalam perjanjian kontrak kerja dengan pemerintah kabupaten kotawaringin barat yaitu belum adanya payung hukum terhadap konsultan dalam melaksanakan konsultansi dalam rangka memberikan kepastian hukum pada konsultan yang bekerja, adanya beberapa klausa yang memberatkan konsultan dalam melaksanakan konsultansi diantaranya : penghentian kontrak dan pemutusan kontrak, denda dan ganti rugi, serta keadaan kahar, Kontrak kerja yang seharusnya dilakukan sehingga memberikan keadilan kepada masing-masing pihak secara seimbang, diantaranya adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai jasa konsultansi, sehingga memberikan asas kepastian hukum dalam melakukan pekerjaan dan perlindungan terhadap jasa konsultansi. Klausula kontrak yang memberikan keuntungan kepada pihak konsultan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kontrak kerja, diantaranya perpanjangan waktu pelaksanaan kerja, kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia, adanya klausa harga kontrak, klausa perdamaian dalam kontrak kerja, dan klausa perdamaian dalam kontrak kerja. Rekomendasi agar pola hubungan hukum diatur melalui kontrak kerja antara satu pihak dengan pihak lainnya dilakukan dengan perjanjian kerja guna menjamin adanya suatu perikatan pada kedua belah pihak. Agar dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Jasa Konsultansi yang dilakukan oleh Konsultan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaannya. Supaya dalam pencantuman klausa kontrak kerja antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin dengan Perusahaan yang memberikan Jasa Konsultan dilakukan secara adil dan seimbang sehingga menghasilkan kontrak kerja yang sesuai dengan harapan antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Terhadap, Konsultan, Dalam, Kontrak Kerja.**

## **Latar Belakang Permasalahan**

Dewasa ini pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangan krisis moneter. Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya.

Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan. Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk

materi hukum, pembinaan aparat, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Agar pelaksanaan pembangunan itu tersebut mencapai hasil yang maksimal maka pemerintah daerah menyerahkan pelaksanaan pembangunan tersebut kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemerintah. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan, pekerjaan yang dilakukan untuk pembangunan ini bersifat fisik dan juga non fisik. Sarana tersebut berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Proyek konstruksi dikelola oleh sekelompok orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap proyek dikelola oleh tim yang terdiri dari manajer proyek (*project manager*), *site manager*, teknik, administrasi kontrak, personalia dan keuangan. Dengan banyaknya pihak

yang terlibat dalam proyek konstruksi maka terjadinya konflik sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup tinggi.<sup>1</sup>

Didalam pelaksanaan berbagai pembangunan yang bersifat fisik, pihak pemberi kerja menginginkan agar suatu sarana bangunan yang di bangun itu dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai seperti yang tertera di dalam kontrak serta mempunyai mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Untuk mencapai keinginan tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan mengadakan penilaian terhadap bonafiditas calon kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan melalui prakualifikasi dan pelelangan. Dalam praktek hal ini belum terlaksana dengan baik dan masih menyimpang dari berbagai ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada:<sup>2</sup>

- a. Konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur
- b. Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*)
- c. Perakitan atau instalasi komponen pabrikasi
- d. Penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*)
- e. reboisasi

Usaha jasa pemborongan sudah lazim digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini sebagai *bouwheer* dalam pekerjaan proyek berskala besar. Maka para pihak yang memiliki pekerjaan (*owner/bouwheer*)

---

<sup>1</sup>Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit Andi, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2005, hal. 11

<sup>2</sup>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penjelasan pasal 4 huruf b)

dan pemborong (kontraktor), terikat dalam suatu bentuk perjanjian pemborongan tentang pembuatan suatu karya (*het maken van werk*).<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai perjanjian pemborongan telah diatur dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.<sup>4</sup>

Sebelum ditentukan pemborong mana yang dipilih untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, terlebih dahulu haruslah dilakukan prakualifikasi terhadap calon-calon pemborong yang ada. Perbuatan prakwalifikasi pemborong ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimana mereka mempunyai usaha pokok berupa pelaksanaan pekerjaan pemborongan, konsultasi dan pengadaan barang/jasa lainnya.<sup>5</sup>

Prakwalifikasi adalah sebelum ditentukan pemborong mana yang dipilih untuk mengerjakan proyek proyek pemerintah, terlebih dahulu haruslah dilakukan prakwalifikasi terhadap calon-calon pemborong yang ada. Prakwalifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar

---

<sup>3</sup>FX. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 5

<sup>4</sup>R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal 391.

<sup>5</sup>Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 170

perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum dimana mereka mempunyai usaha pokok berupa pelaksanaan pekerjaan pemborongan, konsultasi dan pengadaan barang/jasa.

Sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan oleh kontraktor terlebih dahulu pemberi kerja membuat perjanjian pemborongan (kontrak) dengan pihak perusahaan jasa konstruksi yang akan bertindak sebagai kontraktor. Dalam proyek konstruksi harus mempunyai dokumen kontrak yang terdiri dari gambar kontrak (*contractdrawing*), spesifikasi (*spesification*), syarat-syarat umum kontrak (*general conditionof contract*), dan risalah penjelasan pekerjaan pemborongan (*formal agreement*). Perjanjian pemborongan dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktek, apabila perjanjian pemborongan menyangkut biaya yang besar, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan;

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak;
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
- b. Perjanjian kerja/perburuhan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Untuk proyek-proyek Pemerintah, perjanjian pemborongan biasanya dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Perjanjian yang dibuat dengan formulir-formulir tertentu disebut perjanjian standar. Perjanjian pemborongan dibuat dengan Perjanjian Standar, karena hal ini menyangkut Keuangan Negara yang besar jumlahnya dan untuk melindungi keselamatan umum. Arti perjanjian standar adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan peraturan standar. Perjanjian pemborongan hanya ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian pemborongan yaitu: pihak kesatu disebut pihak yang memborongkan atau prinsipal, (*bouwheer*, Kepala Kantor, satuan Kerja, Pemimpin Proyek); dan pihak kedua disebut pemborong atau Rekanan, Kontraktor atau Konsultan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesepuluh, Bandung, 1995, hal. 57

<sup>7</sup>FX. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal 3



Pada umumnya, pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum atau terbatas. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (*wanprestasi*), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*).

*Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai ‘keadaan memaksa’ merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (lihat pasal 1244 KUHPerdara). Dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat kausa-kausanya *forcemajure* menurut KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga

Dalam hal ini, menurut Pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori *wanprestasi* kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beritikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.

2. *Force majeure* karena keadaan memaksa

Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (lihat pasal 1245 KUH Perdata).

### 3. *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang<sup>8</sup>

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku). Maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1245 KUH Perdata).

Wujud wanprestasi bisa berupa: debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur terlambat berprestasi.<sup>9</sup> Maksud dari debitur dalam hal ini adalah pihak kontraktor/konsultan. Namun karena yang namanya ganti rugi itu adalah untuk mengganti apa seharusnya dalam keadaan normal akan diperoleh kreditur, kalau debitur tidak wanprestasi maka tuntutan ganti rugi, sebagai akibat sita jaminan.<sup>10</sup> Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.<sup>11</sup>

Disamping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa

---

<sup>8</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 114

<sup>9</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hal. 122

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 181

<sup>11</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 45

pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam Undang-undang, maka wanprestasi nya si debitur resmitterjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur (lihat pasal 1238 KUH Perdata). Akta lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada Civil Law seperti prancis, Jerman, Belanda dan karenanya juga Indonesia. Akta lalai ini sering disebut dengan somasi. Somasi merupakan teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berhutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Tenggang waktu penyampaian somasi dilakukan maksimal tiga kali dalam waktu 90 hari, jika waktu ini terlewati dan ternyata prestasi juga tidak dipenuhi maka barulah dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi dan karenanya dapat dituntut ke pengadilan. Di samping itu, untuk menghindari terjadinya wanprestasi juga dilakukan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam kenyataannya hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih menyimpang dari berbagai petunjuk yang telah ditentukan dan berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku. Kenyataan diatas menyebabkan banyak bangunan fisik yang di bangun tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu seperti yang di rencanakan. Hal ini disebabkan karena kualitas dari bangunan itu memiliki mutu yang rendah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

konstruksi. Di dalam proyek konstruksi, kontraktor harus menyerahkan jaminan sebelum melakukan pekerjaan di bidang konstruksi.

Pelaksanaan konstruksi yang berkembang pesat di Indonesia, harus didukung dengan peraturan-peraturan yang bersifat '*living constitution*' melalui peran hukum kontrak yang dapat menjamin bahwa pembangunan tersebut akan berlangsung secara teratur dan aman bagi semua pihak sehingga jika terjadi permasalahan atau kegagalan proyek pembangunan tidak bermuara ke ranah hukum. Di negara maju sangat jarang permasalahan kontrak diselesaikan melalui pengadilan formal seperti pengadilan negeri, biasanya mereka menyelesaikan secara nonformal melalui mediasi dan arbitrase.

Meskipun telah terbit Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun sampai saat ini Indonesia belum punya UU yang mengatur tentang jasa konsultan, yang ada hanya UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi itu tidak cukup kuat untuk memfasilitasi kepentingan konsultan yang selama ini kerap dirugikan karena berbagai tuntutan hukum baik dari pihak pengguna jasa (swasta dan pemerintah) maupun pihak pengawas (BPK, KPK, LSM, media). Seringkali konsultan diaudit oleh berbagai pihak seperti polisi, KPK, BPK, bahkan media, dengan asumsi masing-masing sehingga tidak ada sinkronisasi tentang bagaimana memahami bahasa yang ada dalam kontrak kerja.

Sebelumnya sudah pernah ada yang mengajukan draf UU jasa konsultan tersebut kepada DPR, namun tidak ada tindak lanjutnya hingga kini.

Saat ini terdapat beberapa anggota INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) yang sudah ditahan, dan lainnya menjadi tersangka karena tidak benar-benar memahami bahasa dalam kontrak konstruksi. Untuk itu INKINDO berharap adanya Undang-Undang yang dapat mengurangi risiko hukum yang cenderung merugikan pihak konsultan baik karena penyelewengan kontrak ataupun karena kegagalan bangunan. Diharapkan undang-undang tentang jasa konsultan dapat diwujudkan agar profesi konsultan memiliki payung hukum yang jelas dan menjadi sebuah profesi yang tidak terpinggirkan.

Hal tersebut tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Pangkalan Bun juga dialami para konsultan, dimana risiko hukum yang cenderung merugikan pihak konsultan baik karena penyelewengan kontrak ataupun karena kegagalan bangunan banyak dialami para konsultan di Kabupaten tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :Bagaimana seharusnya kontrak kerja dilakukan sehingga memberikan keadilan kepada masing-masing pihak secara seimbang?

### **Pembahasan**

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini hanya terbatas pada suatu Badan Hukum yakni Perusahaan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya jasa konsultasi yang memiliki jasa pemikiran konsultan dalam perjanjian kontrak kerja memerlukan suatu aturan khusus yang mengatur mengenai Konsultansi. Perundang-undangan yang mengatur mengenai Konsultan memberikan asas kepastian hukum dalam melakukan pekerjaan dan perlindungan terhadap jasa konsultansi.

Han Kelsen dalam kaitannya dengan hierarki Norma hukum, mengatakan melalui teorinya bahwa “norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi; demikian seterusnya sampai pada

suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).<sup>12</sup>

Suatu negara merupakan suatu landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi peraturan negara lebih lanjut. Sedangkan aturan dasar (*grundgesetze*) merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok, bersifat dasar, dan biasanya merupakan landasan luas bagi tata hukum yang lebih terperinci lagi. Sebagaimana norma dasar suatu negara (*staatsfundamentalnorn*) memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk undang-undang dasar maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan bagi hukum perundang-undangan (*gesetzesrecht*) yang berlaku dalam negara.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Bustanul Arifin efektifnya sebuah hukum didukung oleh 3 pilar, yakni ;

- a. Lembaga penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan;
- b. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi. ”<sup>14</sup>

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

---

<sup>12</sup>Han Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, Wien, Manzche Verlag & Universitätsbuchhandlung. 1979. Hal 13

<sup>13</sup> A Hamid S Attamini, UUD 1945, TAP MPR, Undang-undang, dalam bukunya Padmo Wahyono, *Masalah kenegaraan Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984. Hal 126.

<sup>14</sup>Zaenuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007 hal 62

1. Perundang - undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”<sup>15</sup>

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah <sup>16</sup>

A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas peraturan perundang-undangan baik formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut : <sup>17</sup>

1. Asas–asas formal :
  - a) Asas tujuan yang jelas.
  - b) Asas perlunya pengaturan.
  - c) Asas organ / lembaga yang tepat.
  - d) Asas materi muatan yang tepat.
  - e) Asas dapat dilaksanakan.
  - f) Asas dapat dikenali.
2. Asas–asas materiil :
  - a) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
  - b) Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
  - c) Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.

<sup>15</sup>Maria Farida Indrati. S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

<sup>16</sup>Pasal 7 ayat (1). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>17</sup>A. Hamid S. Attamimi, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dan pengemangan pengajarannya di fakultas hukum.



- d) Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi

Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, di mana sebuah negara menganut paham konstitusi.<sup>18</sup>

Peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli, kemudian penulis akan mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian kelompok asas utama (1) asas materil atau prinsip-prinsip substantif; dan (2) asas formal atau prinsip-prinsip teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekantanto, memperkenalkan enam asas sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);

---

<sup>18</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu perundang-undangan* (dasar-dasar dan pembentukannya). Kanisius. 1998. Yogyakarta

<sup>19</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. Ke-3, hal 7

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Perundang-undangan sangat penting, seperti salah satunya memahami tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena di dalamnya terdapat acuan bagaimana cara melahirkan sebuah produk hukum dalam hal ini undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan publik. “Peraturan perundang-undangan tersebut dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain dalam hal hukum pidana misalnya: asas legalitas, maksudnya asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga takbersalah. Dalam hukum perdata, misalnya dalam perjanjian antara lain : asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan iktikad baik.”<sup>20</sup>

### **Klausula Kontrak Yang Memberikan Keuntungan Kepada Pihak Konsultan Dalam Pelaksanaan Dan Penyelesaian Kontrak**

#### **a. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan**

- 1) Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dapat diberikan Kuasa Pengguna Anggaran atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

##### **a) Pekerjaan tambah**

---

<sup>20</sup>Soefyanto, Peraturan perundang-undangan (dasar dan teknik pembuatan). Universitas Islam Jakarta, cetakan tahun 2007, hal 25

- b) Perubahan Ruang Lingkup pekerjaan
  - c) Keterlambatan yang disebabkan oleh KPA
  - d) Masalah yang timbul diluar kendali penyedia
  - e) Keadaan Kahar.
- 2) Waktu Penyelsaian pekerjaan Dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak Akibat keadaan kahar
  - 3) KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia
  - 4) KPA dapat menugaskan Tim Pendukung yaitu panitia peneliti pelaksanaan kontak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan
  - 5) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Adensum Kontrak. <sup>21</sup>

**b. Adanya Kerjasama Antara Penyedia Dengan Sub Penyedia**

- 1) Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh Sub Penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA
- 2) Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh Sub Penyedia

---

<sup>21</sup>Op Cit. Surat Perjanjian Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 hal.16

- 3) Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.<sup>22</sup>

**c. Adanya Klausula Harga Kontrak**

- 1) KPA membayar kepada peserta atas pelaksanaan pekerjaannya
- 2) Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (*overhead*) biaya sosial (*social charge*) keuntungan (*profit*) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu
- 3) Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rincian biaya personil dan rincian biaya non personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan biaya.
- 4) Kontrak pengadaan jasa konsultasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.<sup>23</sup>

Pasal 1243 KUPerdata menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

---

<sup>22</sup> I b l d. hal.16

<sup>23</sup> I b l d. hal.17

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”<sup>24</sup>

**d. Adanya Klausula Perdamaian Dalam Kontrak kerja**

1. Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini.
2. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara para pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.
3. Lembaga Pemutus Sengketa  
Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui :
  - a. Arbitrase
  - b. Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau
  - c. Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

**e. Adanya Klausula Kewajaran Dan Itikad Baik**

1. Itikad Baik

---

<sup>24</sup>Op Cit. Pasal 1243. Solahudin. KUHP, KUHP dan KUHPerdara.

<sup>25</sup>I b l d. hal.20

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- c. Masing-masing pihak dalam kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan kontak ini.

## 2. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan kontrak maka masing-masing pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar diantara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika pihak harus mengupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.<sup>26</sup>

## Kesimpulan

1. Bahwa pola-pola hubungan hukum yang terjadi didalam kontrak kerja antara konsultan PT. Mega Surya Konsultan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dinas Pertanian Dan Peternakan yakni dengan Surat Perjanjian Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan

---

<sup>26</sup> I b l d. hal.15

Usaha Tani Yakni Dengan Surat Perjanjian Atau Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi.

2. Kendala yang dihadapi untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsultan dalam perjanjian kontrak kerja dengan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sbb :
  - a. Belum Adanya Payung Hukum Terhadap Konsultan dalam Melaksanakan Konsultansi dalam rangka memberikan kepastian hukum pada Konsultan yang bekerja.
  - b. Adanya Beberapa Klausula Yang Memberatkan Konsultan dalam Melaksanakan Konsultansi diantaranya : Penghentian Kontrak dan Pemutusan Kontrak, Denda Dan Ganti Rugi, serta Keadaan Kahar
3. Kontrak kerja yang seharusnya dilakukan sehingga memberikan keadilan kepada masing-masing pihak secara seimbang, diantaranya sbb :
  - a. Adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai jasa konsultansi, sehingga memberikan asas kepastian hukum dalam melakukan pekerjaan dan perlindungan terhadap jasa konsultansi.
  - b. Klausula kontrak yang memberikan keuntungan kepada pihak konsultan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kontrak kerja, diantaranya Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kerja, Kerjasama Antara Penyedia Dengan Sub Penyedia, Adanya Klausula Harga Kontrak, Klausula Perdamaian Dalam Kontrak kerja, dan Klausula Perdamaian Dalam Kontrak kerja

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, : Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.
- Amiroedidin Syarif. Perundang-undangan (Dasar, Jenis, Teknik Membuatnya). Rineka Cipta. Bandung. 1997.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang. Mediantama, Yogyakarta. 2008
- CST Kansil, Hukum Kewarganegaraan Republik Indoensia. Jakarta. Sinar Grafika. 196
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,
- Ervianto, Wulfram I, Teori – Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi, Yogyakarta, 2004
- FX. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, , Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2005
- H.R.Otje Salman-Anthon F.Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Iman Soeharto, Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional), Jilid 2, Erlangga, 2001.
- Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009..
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999
- Jimly Assiddiqie. Perihal Undang-undang. Konstitusi Press. Jakarta. 2006



Latief Yusuf, Diktat Kuliah Perencanaan dan Penjadualan Konstruksi, Jurusan Sipil FTUI 2001.

M Nuracmad. Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian Hal 20. Visi Media Pustaka. Jakarta. 2010

M . Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1994

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu perundang-undangan* (dasar-dasar dan pembentukannya). Kanisius. 1998. Yogyakarta

Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996

Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009

*Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.PT Bina Ilmu, 1987.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesepuluh, Bandung, 1995

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2002

, *Aneka Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984,

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta. Rajawali. 1983

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Solahuddin. KUHP, KUHP, dan KUHPPerdata. Visimedia. Jakarta. 2012

Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Liberty Jogjakarta. 1991.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985

Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit Andi, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2005.

Zaenuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007

#### **Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,

Surat Perjanjian Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013

